

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama. Penerimaan negara ini harus terus ditingkatkan secara optimal, agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun demikian, penerimaan negara dari sektor pajak sangat rendah atau belum optimal. Fenomena tersebut dapat dilihat dari perbandingan rasio pajak (*tax ratio*) terhadap Produk domestik bruto (PDB). Rata-rata-rasio pajak negara dalam kurun waktu delapan tahun terakhir sebesar 12 % dan rasio pajak pada tahun 2014 adalah sebesar 12,4% persen (Prastowo, 2015). Hal ini menunjukan penerimaan pajak negara Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara yang memiliki perekonomian setara (menengah ke bawah) seperti Filipina yang ratio pajaknya sebesar 12,9%, Thailand 16,5%, Malaysia 16,1%, dan Singapura 14%. Bahkan dalam lima tahun terakhir Indonesia tidak pernah mencapai 14 persen (Lusiana, 2015).

Salah satu alasan tidak optimalnya penerimaan pajak karena adanya fenomena penghindaran pajak. Oleh sebab itu, bagi perusahaan pajak merupakan beban sehingga perusahaan cenderung

membayar pajak serendah mungkin atau melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, sedangkan usaha pengurangan usaha pengurangan pembayaran pajak secara illegal disebut (*tax evasion*).

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi atau mengoptimalkan beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), di mana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Akan tetapi, perencanaan pajak tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Menurut Mulyani, Darminto, dan Endang (2014) penghindaran pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif, secara pasif diakibatkan oleh adanya hambatan hambatan yang mempersulit pemungutan pajak. Perlawanan ini tidak dilakukan secara aktif apalagi agresif oleh para wajib pajak. Sedangkan perlawanan aktif mencakup ruang lingkup usaha dalam perbuatan secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Oleh karena itu masalah

penghindaran merupakan persoalan yang rumit. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan tetapi, disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah. Penghindaran pajak sendiri terjadi akibat adanya hubungan keagenan (*agency theory*) antara pemilik dan pengelola perusahaan, dimana pemilik ingin perusahaan memperoleh laba yang besar sehingga akan mendorong pengelola perusahaan untuk meminimalkan beban pajak.

Ada banyak hal dalam perusahaan yang berkaitan atau berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini bisa dilihat pada penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Mulyani, Darminto, dan Endang (2014), yang meneliti tentang pengaruh karakteristik perusahaan, koneksi politik dan reformasi perpajak terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel variabel independent tersebut berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian ini, salah satu variabel yang akan diteliti adalah karakteristik perusahaan.

Karakteristik perusahaan merupakan salah satu yang berpengaruh pada penghindaran pajak. Karakteristik perusahaan adalah ciri khas suatu entitas usaha di mana karakteristik satu perusahaan dengan perusahaan yang lain memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik perusahaan mempengaruhi perusahaan dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan jumlah pajak yang akan dibayarkan. Karakteristik perusahaan dapat dilihat dari berbagai segi, salah satunya dari ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi

perusahaan besar dan perusahaan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan (Kurniasih dan Sari, 2013). Semakin besar nilai total penjualan, total aset, dan kapitalisasi pasar, maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, perbandingan antara kewajiban dan ekuitas juga semakin besar maka, akan banyak tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan, persaingan pun akan semakin ketat tetapi disisi lain perusahaan akan lebih diawasi pemerintah. Sehingga kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan lebih sulit jika dibandingkan dengan perusahaan berukuran kecil.

Selain karakteristik perusahaan penelitian ini juga menggunakan karakteristik eksekutif sebagai variabel independent. Hal ini mengacu pada penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Budiman (2012) mengenai pengaruh karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak. Karakteristik eksekutif (pemimpin) merupakan sifat atau watak yang melekat pada tiap eksekutif. Eksekutif perusahaan (CEO, CFO, dan *Top Executive* yang lain) sebagai individu pengambil kebijakan pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Menurut Low (2006) dalam Budiman (2012) menyebutkan bahwa, dalam menjalankan tugasnya pimpinan perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasa memiliki dorongan yang kuat sehingga karakter seperti ini lebih berani

membuat keputusan dan berani mengambil resiko yang tinggi. Berbeda dengan karakter *risk averse*, karakteristik eksekutif yang *risk averse* merupakan karakter yang lebih lebih pasif dalam mengambil keputusan yang beresiko tinggi dan lebih menyukai keputusan tidak mempunyai resiko yang tinggi. Untuk mengetahui jenis karakter individu (*eksekutif*) yang duduk dalam manajemen perusahaan apakah mereka merupakan *risk-taking* atau *risk-averse* bisa diukur dengan melihat pada besar-kecilnya risiko perusahaan (*corporate risk*) yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan dan karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini disebabkan karena, perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang aktivitas usahanya paling kompleks dan berkaitan dengan aspek perpajakan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah karakteristik perusahaan manufaktur berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah karakteristik eksekutif perusahaan manufaktur berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menguji pengaruh karakteristik perusahaan manufaktur terhadap penghindaran pajak.
2. Menguji pengaruh karakteristik perusahaan manufaktur eksekutif terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kontribusi akademik dan praktik. Adapun penjelesan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat akademik
 - a. Menambah pengetahuan pada bidang akuntansi, khususnya tentang penghindaran pajak
 - b. Sebagai sarana untuk memperluas dan menambah referensi mengenai penghindaran pajak
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktik
 - a. Penelitian ini dapat digunakan oleh pararegulator dan investor untuk proses pengambilan keputusan untuk menanamkan saham pada perusahaan

- b. Penelitian ini dapat digunakan oleh para kreditor untuk proses pemberian pinjaman kepada perusahaan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, yang akan dijadikan sebagai pedoman untuk mencari penyelesaian masalah penelitian, model analisis dan hipotesis penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran instrumen penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang obyek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan dari masing-masing hasil analisis yang dilakukan.

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang simpulan dari hasil penelitian yang berisi jawaban dari rumusan masalah, keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya yang diharapkan bermanfaat bagi banyak pihak